

**ETNOSENTRISME DAN EKONOMI POLITIK DALAM
WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN PINRANG
UTARA**



MUH. YUSRIL HIDAYATULLAH

E041191072



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

HALAMAN PENGAJUAN

**ETNOSENTRISME DAN EKONOMI POLITIK DALAM WACANA
PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN PINRANG UTARA**

Yang Diajukan Oleh :
MUH. YUSRIL HIDAYATULLAH
E041191072

Skripsi,

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
ETNOSENTRISME DAN EKONOMI POLITIK DALAM
WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN PINRANG
UTARA

Yang Diajukan Oleh :

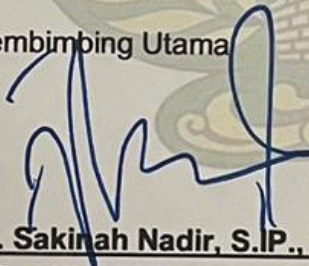
MUH. YUSRIL HIDAYATULLAH

E041191072

Skripsi,
telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada
tanggal 26 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat kelulusan
pada

Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

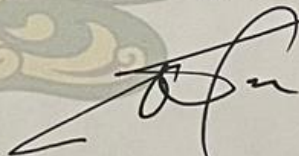
Pembimbing Utama



Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.

NIP. 1979123 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Haryanto, S.IP., M.A

NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul **"ETNOSENTRISME DAN EKONOMI POLITIK DALAM WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN PINRANG UTARA"** adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (**Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si.** sebagai Pembimbing Utama dan **Haryanto, S.IP, M.A** sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.



MUHL YUSRIL HIDAYATULLAH
E041191072

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Etnosentrisme dan Ekonomi Politik Dalam Wacana Pemekaran Wilayah Kabupaten Pinrang Utara**”. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Skripsi ini penulis persembahkan dan haturkan kepada dua orang yang sangat berjasa didalam hidup penulis, yang pertama kepada sosok perempuan di desa yang telah menghabiskan masa baktinya sebagai guru bernama **Sitti Annis**, dia adalah ibuku. Keningnya menempel di atas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Hingga penulis dapat menapaki cita-citanya semua tidak terlepas dari peranan dan doanya. Hanya seuntai do'a yang dapat penulis berikan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikannya dengan balasan yang berlipat ganda. Amiin

Selanjutnya, lelaki yang menjadi sosok pahlawan dalam hidup penulis, **Almarhum Ridwan**, Ayahku. Sosok yang ketika penulis berkata ingin menjadi presiden selalu melempar senyum penuh dukungan, dan dukungan itupun yang terus mendorong penulis dalam berproses termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Harap penulis, semoga engkau kembali tersenyum bangga melihat anakmu ini terus melangkahkan kakinya.

Selanjutnya, terima kasih kepada saudara-saudari penulis **Asriani Ridwan, Nurrahmi Ridwan, dan Azrai Taufik** serta kakak ipar **Hadi Tri Widoko** yang selalu memberikan nasehat serta arahan yang berkualitas kepada si bungsu.

Skripsi ini pun penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya “*kapan skripsimu selesai?*”, dan “*kapan kamu wisuda?*”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Karna mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus,

dan percayalah, alasan penulis disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.** dan Bapak **Haryanto, S.IP., M.A.** yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018- 2022, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** yang memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**, sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.**, Alm. Bapak **Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr.**

Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Ibu **Endang Sari, S.IP., M.Si.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.**, Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.**, dan Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.**, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S.T.**, dan Ibu **Musriati S.E.**, yang telah membantu dan memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Departemen Ilmu Politik.
9. Kepada seluruh narasumber / informan Bapak **H. Alimuddin Budung, S.Hi., MM.**, Bapak **A. Aan Nugraha, S.IP.**, Bapak **Nasruddin Jafar, S.IP.**, Bapak **Muh. Syafei** atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar **Iskandar Family**. Terima kasih untuk banyaknya perhatian, kasih sayang, dukungan, motivasi dan doanya selama ini. Segala jalan yang ditempuh penulis adalah untuk mengharumkan nama keluarga besar ini.
11. Kepada sahabat terbaik penulis, **Ardian, S.Tr.Par** dan **Nurfajrina, S.I.Kom** yang menjadi *support system* penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Sahabat yang menjadi kompas hidup, mengarahkan ketika tersesat, mendorong ketika lambat, dan saling merayakan ketika senang. Terimakasih atas semua dukungannya, bagi penulis dukungan kalian sangat mahal harganya.
12. Kepada seluruh teman-teman **Ilmu Politik angkatan 2019, Diplomasi 2019**, dan **Himapol Fisip Unhas**. Terima Kasih atas segala lika-liku yang telah dilewati bersama sebagai sebuah keluarga kecil yang harmonis. Doa penulis untuk kesuksesan teman-teman kelak
13. Kepada sahabat penulis, **Nadira Ulfanisa, S.IP** yang penulis anggap sebagai seorang saudari walaupun tak sedarah, yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, nasehat, serta dukungan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi tempat penulis berkeluh kesah terhadap segala hal yang penulis lalui.
14. Kepada seluruh kerabat baik penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan suasana positif serta

lingkungan yang sehat untuk penulis. Terimakasih karna telah menjadi tempat penulis bertukar pikiran, bertukar cerita, dan bertukar rasa. Semoga hal-hal baik menghampiri kehidupan kita semua.

15. Terakhir, untuk diri penulis sendiri. Jalan berliku, penuh bebatuan ternyata tanpa sadar walaupun berat mampu penulis lalui. Rasanya terlalu arogan ketika penulis lupa untuk terus mengucapkan syukur terhadap hal-hal yang telah dilalui dan digapai. Terima kasih karna telah bertahan dan menolak untuk berbalik dan menyerah. Bagi penulis, *Giving up is not a choice*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki kelalaian dan keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis,

Muh. Yusril Hidayatullah

ABSTRAK

MUH. YUSRIL HIDAYATULLAH. **Etnosentrisme dan Ekonomi Politik dalam Wacana Pemekaran Wilayah Kabupaten Pinrang Utara** (dibimbing oleh Sakinah Nadir dan Haryanto).

Latar belakang. Suku pattinjo yang mayoritas menghuni bagian utara Kabupaten Pinrang merasa bahwa dalam berjalannya pemerintahan, daerah utara Kabupaten Pinrang cenderung kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang terjadi di bagian utara Kabupaten Pinrang **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh etnosentrisme dalam wacana pemekaran wilayah Kabupaten Pinrang Utara serta melihat bagaimana faktor ekonomi politik yang juga menjadi faktor penunjang dalam munculnya wacana tersebut. **Metode.** Didalam penelitian ini menggunakan teori FIRO dan teori ekonomi politik. Teori FIRO digunakan untuk memahami situasi etnosentrisme serta pengaruhnya dan teori ekonomi politik digunakan untuk menjelaskan tuntutan masyarakat dalam wacana tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. **Hasil.** Penelitian ini menunjukkan bahwa yang terjadi dilapangan masyarakat suku pattinjo tidaklah menunjukkan adanya perilaku etnosentrisme dan hubungan antara kedua etnis yaitu bugis dan pattinjo cenderung harmonis. Namun, alih-alih karena adanya isu etnosentrisme, wacana pemekaran ini justru muncul akibat adanya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang saat ini dirasa tidak merata jika melihat kondisi daerah di bagian utara Kabupaten Pinrang. **Kesimpulan.** Secara garis besar wacana pemekaran Kabupaten Pinrang Utara merupakan sebuah persoalan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di bagian utara Kabupaten Pinrang. Yang seiring berjalannya waktu dikaitkan dengan isu etnisitas yang kemudian dianggap sebagai sebuah fenomena Etnosentrisme.

Kata kunci : Etnosentrisme, Ekonomi Politik , Wacana Pemekaran Wilayah, Pemerataan

ABSTRACT

MUH. YUSRIL HIDAYATULLAH. Ethnocentrism and Political Economy in the Discourse on Regional Expansion of North Pinrang Regency (supervised by Sakinah Nadir and Haryanto).

Background. The Pattinjo tribe, which predominantly lives in the northern part of Pinrang Regency, feels that in the course of government, the northern area of Pinrang Regency tends to receive less attention from the Pinrang Regency government, resulting in economic inequality occurring in the northern part of Pinrang Regency. **Aim.** This research aims to find out how ethnocentrism influences the discourse on the expansion of the North Pinrang Regency area and see how political economic factors are also supporting factors in the emergence of this discourse. **Method.** This research uses FIRO theory and political economy theory. FIRO theory is used to understand the situation of ethnocentrism and its effects and political economy theory is used to explain society's demands in this discourse. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques using interviews and documentation. **Results.** This research shows that what is happening in the Pattinjo tribe community does not indicate ethnocentrism behavior and the relationship between the two ethnic groups, namely Bugis and Pattinjo, tends to be harmonious. However, rather than because of the issue of ethnocentrism, this expansion discourse actually emerged as a result of community demands to realize equitable development which is currently felt to be uneven if you look at the conditions of the area in the northern part of Pinrang Regency. **Conclusion.** In general, the discourse on the expansion of North Pinrang Regency is an issue of equitable development to improve the economy and welfare of the people in the northern part of Pinrang Regency. Over time, it was linked to the issue of ethnicity, which was then considered an ethnocentrism phenomenon.

Keywords: Ethnocentrism, Political Economy, Discourse on Regional Expansion, Equalization

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 . Latar Belakang	1
1.2 . Rumusan Masalah.....	4
1.3 . Tujuan Penelitian.....	4
1.4 . Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Konsep Etnosentrisme.....	6
2.2. Teori Psikologi Politik.....	9
2.3. Konsep Ekonomi Politik	12
2.4. Konsep Pemekaran Wilayah.....	16
2.5. Penelitian Terdahulu.....	19
2.6. Kerangka Pemikiran	21
2.7. Skema Pemikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Dasar, Tipe dan Jenis Penelitian	23
3.2. Lokasi Penelitian	24
3.3 Sumber Data	24
3.3.1. Data Primer	25
3.3.2. Data Sekunder.....	25
3.4. Informan Penelitian.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5.1. Wawancara Mendalam	27
3.5.2 Arsip/Dokumen	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.6. 1 Reduksi Data	28
3.6. 2 Penyajian Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	30
4.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten	30

4.2. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang	31
4.3. Kabupaten Pinrang bagian Utara.....	32
4.3.1 Sumber Daya Alam.....	33
4.3.2 Kondisi Masyarakat	33
4.3.3 Pemerataan Pembangunan	34
4.4. Sejarah dan Karakter Etnis Pattinjo di Kabupaten Pinrang	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	37
5.1. Pengaruh Etnosentrisme	37
5.1.1. Inklusi	39
5.1.2. Kontrol	40
5.1.3. Afeksi.....	41
5.2. Pengaruh Ekonomi Politik.....	44
5.2.1. Pemerintahan Sendiri	44
5.2.2. Pengelolaan Sumber Daya	47
5.3. Hubungan Etnosentrisme dan Ekonomi Politik dalam wacana Pemekaran Kabupaten Pinrang Utara	51
BAB VI PENUTUP	55
6.1. Kesimpulan.....	55
6.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Keberagaman budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi satu nilai yang sangat khas dan menjadi wajah negara ini. Kata “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu menjadi sebuah semboyan negara Indonesia yang sudah cukup menjadi penanda begitu banyaknya budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke . Keberagaman budaya ini seolah menjadi identitas bagi Indonesia yang dikenal dengan gugusan pulau-pulaunya yang begitu banyak.

Berdasarkan sensus penduduk pada 2010, ada 1.331 suku di Indonesia.¹ Dengan begitu banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia memberikan kita gambaran bagaimana luas dan beragamnya etnisitas yang ada di Indonesia. Ribuan suku ini tersebar di berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai ke Merauke.

Dibalik indahnya kemajemukan budaya yang ada di Indonesia ini, tentunya tidak lepas oleh aspek-aspek negatif yang mengikutinya. Salah satu hal yang menjadi masalah disaat suatu daerah diisi oleh beragam kebudayaan yaitu munculnya paham Etnosentrisme. Menurut Poerwanti, Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa kelompok sendiri merupakan pusat segalanya. Kelompok ini selalu membandingkan nilai dan standar budayanya lebih baik dari kelompok lain.²

Etnosentrisme menjadi masalah fatal bagi negara yang memiliki keragaman budaya yang begitu banyak seperti Indonesia. Hal ini dapat memicu berbagai masalah, seperti terjadinya konflik, kekacauan, dan yang paling buruk adalah perang saudara yang dapat mengacaukan kesatuan negara Republik Indonesia.

¹ <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>

² Poerwanti, E. (2006). Pemahaman Psikologi Masyarakat Indonesia Sebagai Upaya Menjembatani Permasalahan Silang

Salah satu solusi untuk mencegah terjadinya konflik-konflik etnosentrisme dalam negara adalah melakukan pemekaran wilayah. Aturan mengenai pemekaran suatu wilayah tertuang dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan saat ini direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Walaupun tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah untuk mempercepat laju pembangunan serta member kesejahteraan kepada masyarakat, namun telah banyak terjadi pemekaran wilayah di Indonesia didasari oleh isu-isu etnisitas.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu wilayah yang bisa dibidang cukup luas secara geografis. Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 1.961,77 km², terdapat 12 Kecamatan yang terbagi menjadi 65 Desa dan 39 Kelurahan³. Terdapat dua etnis besar yang menghuni daerah kabupaten Pinrang ini yaitu, Bugis dan Pattinjo. Menilik lebih jauh kebelakang, adanya dua etnis di kabupaten Pinrang ini berasal dari dua kerajaan berbeda, dimana suku Pattinjo berasal dari Kerajaan Letta, dan bugis sendiri berasal dari Kerajaan Sawitto.

Kerajaan letta yang melahirkan etnis Pattinjo terletak di bagian utara Kabupaten Pinrang. Sedangkan Kerajaan Sawitto terletak di bagian selatan Kabupaten Pinrang. Dahulu kedua kerajaan ini memiliki hubungan yang cukup harmonis. Andi Pangerang Moenta menggambarkan bagaimana kedua etnis baik Bugis maupun Patinjo dimasa berkobarnya Perang Pasifik diawal abad ke-IX saling bersatu untuk melakukan perlawanan dibawah komando parapemimpin wilayah masing-masing yang disebut Arung atau Maddika terhadap pemerintah kolonial Belanda yang kala itu ingin menjadikan seluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai daerah OnderAfdeling (wilayah kekuasaan penuh) Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.⁴

Pada tahun 2006, menyeruak isu bahwa masyarakat di Kabupaten Pinrang menuntut untuk diadakannya pemekaran

³ <https://pinrangkab.go.id/kondisi-geografi-kabupaten-pinrang/>, diakses pada 3 Juni 2023

⁴ Wahyu, Muh, et al. "Pergolakan Etnosentrisme-Politis di Kabupaten Pinrang: Studi Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara." *Vox Populi* 3.2 (2020): 105-117

wilayah Kabupaten Pinrang utara, yang kala itu digaungkan oleh sebuah organisasi berbasis etnis yang menaungi Suku Pattinjo yaitu Kesarpati (Keluarga Besar Pattinjo). Kesarpati memulai pergerakan mereka dengan membangun opini publik yang didasarkan pada etnosentrisme dan mengkampanyekan ketimpangan pemerataan pembangunan antara Pinrang bagian utara dibanding wilayah selatan Pinrang.

Rentang waktu 2009-2014 terjadi stagnasi pergerakan dalam proses pemekaran utamanya dalam tubuh Pansus. Mendekatnya Pemilihan Bupati dan Legislatif di 2014 membuat isu pemekaran tenggelam oleh riuh kontestasi politik terbesar di kabupaten. Ketika pemilihan legislatif kembali dilakukan, Pansus Pemekaran Pinrang Utara tidak berhasil melaksanakan tugasnya.⁵

Hal ini terjadi karena semua orang termasuk didalam tubuh DPR sendiri sedang sibuk-sibuknya dalam mengikuti proses Pemilu ditahun itu yang membuat berbagai isu yang digalakkan menjadi kurang diperhatikan. Serta masyarakat pun seolah dibuat fokus untuk membicarakan siapa yang akan menjadi bupati Pinrang kala itu, sehingga isu seperti pemekaran wilayah ini terkesan diabaikan.

Di tahun 2019 aktor-aktor dan elit politik lokal Pinrang Utara seperti ketua Fraksi PKB, H.Alimuddin Budung, S.Hi.,MM yang dengan serius memberikan dukungan kepada Pinrang Utara kembali menghidup-kan isu pemekaran. Juga oleh Nazaruddin Djafar, S.IP menulis sebuah redaksi dengan judul "Menantikan Munculnya Matahari Utara" yang isinya membahas tentang harapan masyarakat untuk mendapatkan revolusi tata kelola pemerintahan di Pinrang Utara yang lebih baik. Para pengurus dan aktivis Kesarpati yang telah berjuang sejak 2006 perlahan mengalami kevakuman disebabkan oleh mulai melemahnya para aktivis Kesarpati dalam menggaungkan isu-isu pemekaran. Sebagai tindak lanjut Gerakan Masyarakat Pinrang Utara

⁵ Wahyu, Muh, et al. "Pergolakan Etnosentrisme-Politis di Kabupaten Pinrang: Studi Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara." *Vox Populi* 3.2 (2020): 105-117.

(Gempita) direvitalisasi, banyak tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa direkrut dalam gerakan tersebut.⁶

Hal ini yang kemudian membuat penulis tertarik serta terdorong untuk melakukan penelitian. Hal ini menjadi menarik dikarenakan sejak jaman dahulu jarang sekali terjadi konflik-konflik antar dua etnis tersebut, namun tiba-tiba masyarakat menuntut untuk melakukan pemekaran wilayah dengan dasar kurangnya kesejahteraan dan kesenjangan pembangunan itu sendiri.

1.2 . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta mengingat luasnya cakupan masalah yang akan diteliti mengenai "Etnosentrisme-politis dalam wacana pemekaran wilayah Kabupaten Pinrang Utara", maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh etnosentrisme dan ekonomi politik dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Pinrang Utara?

1.3 . Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka secara umum penelitian ini bertujuan :

Menggambarkan bagaimana pengaruh etnosentrisme dan ekonomi politik dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Pinrang Utara

1.4 . Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademik, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh etnosentrisme dan ekonomi politik terhadap wacana pemekaran Kabupaten Pinrang Utara
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian serta tinjauan oleh masyarakat terkhusus di Kabupaten Pinrang, tentang pengaruh etnosentrisme dan ekonomi politik terhadap wacana pemekaran Kabupaten Pinrang Utara.

⁶ Wahyu, Muh, et al. "Pergolakan Etnosentrisme-Politis di Kabupaten Pinrang: Studi Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara." *Vox Populi* 3.2 (2020): 105-117.

3. Bagi penelitian selanjutnya, membantu dalam memberikan referensi dan informasi terkait studi politik khususnya mengenai etnosentrisme, ekonomi politik, dan pengaruhnya terhadap pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada pembahasan dibagian ini, peneliti menjelaskan teori dan konsep yang digunakan guna membantu dalam proses penulisan skripsi. Konsep dan teori tersebut nantinya digunakan sebagai bahan utama untuk mengkaji lebih dalam rumusan masalah yang terkait dengan pengaruh Etnosentrisme dalam wacana pemekaran wilayah Kabupaten Pinrang Utara. Dalam penelitian ini, teori etnosentrisme digunakan karena fokus penelitian berdasarkan sikap etnosentrisme masyarakat dan teori politik identitas digunakan sebagai pisau analisa yang digunakan dalam menganalisis fenomena identitas etnis yang digunakan sebagai alat untuk menyuarakan tuntutan pemekaran wilayah

2.1. Konsep Etnosentrisme

Etnosentrisme merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari budaya lainnya atau membanggakan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya lain.

Istilah etnosentrisme dalam sosiologi pertama kali didegungkan oleh W.G. Sumner tahun 1906 untuk melukiskan apa yang disebut *prejudicial attitudes* antara *in-groups* dan *outgroups*. Sikap, kebiasaan, dan perilaku kelompok "kami" lebih superior dari pada kelompok "mereka". Pemikir yang berpandangan picik, sempit dan parokial juga dikritik sebagai beraliran etnosentrisme.⁷

Konsep teoritis tentang etnosentrisme, seperti yang dikembangkan oleh Sumner (1906), mengemukakan bahwa dalam kebanyakan pemikiran atau sikap yang etnosentris meyakini bahawa dirinya atau kelompok yang sejalan dengan pemikirannya sendiri adalah pusat segala sesuatu, dan menganggap di luar dirinya dan kelompoknya mempunyai strata yang lebih rendah. Berry dan Kalin

⁷ Dictionary Sociology, 1984: 83 dalam jurnal Kambo, Gustiana Anwar. "Etnisitas dalam Otonomi Daerah." Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia 1.1 (2015): 1-8

(1995) menunjukkan bahwa konsep etnosentrisme cenderung dipandang sebagai sinonim untuk antipati umum terhadap semua kelompok di luar grup tersebut. Dua ilmuwan Kanada tersebut melakukan banyak penelitian mengenai topik ini dan mengamati bahwa etnosentrisme menunjukkan bahwa kurangnya penerimaan keragaman budaya, intoleransi umum untuk kelompok luar dan cenderung lebih selektif serta hanya ingin berinteraksi dengan beberapa kelompok yang sama dengan kelompoknya.⁸

Dalam konsep etnologi dan antropologi, yang diperkenalkan pada tahun 1907 oleh William Graham Sumner dalam bukunya *Folkways* mengatakan etnosentrisme adalah nama teknis untuk pandangan tentang hal-hal ini dimana kelompok sendiri adalah pusat segala sesuatu, dan kelompok lainnya lebih rendah.⁹

Etnosentrisme mengungkapkan kecenderungan untuk mengistimewakan norma dan tradisi masyarakatnya sendiri hingga merugikan masyarakat lain, dengan kata lain budaya mereka sendiri dianggap lebih unggul dari semua budaya lain. Ini menyiratkan terlalu tinggi kelompok nasional, agama, ras, geografis, yang mereka miliki, dan meremehkan kelompok lain, sehingga menimbulkan prasangka terhadap orang lain.

Dalam Ilmu politik masalah etnosentrisme mencuat ketika hangatya studi perbandingan dalam pembangunan politik di negara-negara berkembang sekitar tahun 1960-an. Sistem politik mereka disebut maju bila berbau barat atau seperti Amerika. Dalam konteks yang lebih teknis, etnosentrisme berpusat pada perkara superioritas ras.¹⁰

⁸ Berry, J. W., & Kalin, R. (1995). Multicultural and ethnic attitudes in Canada: An Overview of the 1991 national survey. *Canadian Journal of Behavioral Science*, 27, 301-320

⁹ William Graham Sumner (1959 [1907]), *Folkways: A Study of Mores, Manners, Customs and Morals* (New York: Dover Publications, 1959 [1907]), 13, apud Sonia Catrina, „Social Categorization as a Manner of Creating Boundaries, Avoiding and Discriminating against the „Other(s)”, in *Sfera Politicii*, nr. 2 (168) / 2012, p.6

¹⁰ Dictionary of politics, 1993; 170-171 dalam jurnal Kambo, Gustiana Anwar. "Etnisitas dalam Otonomi Daerah." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1.1 (2015): 1-8

Kelebihan identitas etnisnya, dimaksud bahwa suatu etnis, memiliki identitas, ciri-ciri, jati diri atau keadaan khusus kelompok tersebut, diantaranya adalah setiap anggota etnis menyadari dan mengakui keanggotaannya, merasa bangga atau merasa istimewa karena keanggotaan tersebut, memiliki hubungan yang mendalam yaitu sangat dekat dan intim, berperilaku berdasarkan aturan, nilai dan norma kelompok berarti memiliki kesepakatan-kesepakatan di dalam kelompok untuk bersama-sama mencapai tujuan utama kelompok.

LeVine (dalam Panduwinarsih, 2010), teori etnosentrisme Summer mempunyai tiga segi, yaitu:

1. Sejumlah masyarakat memiliki sejumlah ciri kehidupan sosial yang dapat dihipotesiskan sebagai sindrom.
2. Sindrom-sindrom etnosentrisme secara fungsional berhubungan dengan susunan dan keberadaan kelompok serta persaingan antarkelompok.
3. Adanya generalisasi bahwa semua kelompok menunjukkan sindrom tersebut.

LeVine menyebutkan sindrom itu seperti: kelompok intra yang aman (*ingroups*) sementara kelompok lain (*outgroups*) diremehkan atau malah tidak aman. Tiga segi teori etnosentrisme diantaranya adalah sejumlah individu ataupun kelompok mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda, fenomena atau karakter tersendiri yang membuat perbedaannya dengan orang atau kelompok lain, antar kelompok memiliki tingkatan dan persaingan, dan secara menyeluruh kelompok memunculkan ciri-ciri untuk membeda-bedakan, meremehkan dan membuat pemisah antar kelompok. Sikap etnosentrisme yang berlebihan atau tidaknya akan menjadi andil penting dalam perkembangan sosial siswa yang menjadi bagian dari masyarakat.¹¹

Etnosentrisme pada dasarnya merupakan wujud etnonasionalisme, yakni perasaan senasib yang timbul dalam satu komunitas etnik atau paham kebangsaan yang berbasis pada sentimen etnik. Semangat etnosentrisme ingin diwujudkan menjadi suatu entitas politik yang bernama “negara-bangsa”.

¹¹ Panduwinarsih, Pina. (2010). Komunikasi Antarbudaya Dan Hubungan Yang Harmonis (Studi Korelasional tentang Peranan Komunikasi Antarbudaya dalam Menjalinkan Hubungan yang Harmonis antara Etnis Tamil dan Non Tamil di Kelurahan Polonia (Online)

Ada upaya homogenisasi pengertian bangsa dalam hal ini, yaitu pengertian bangsa yang lebih diperkecil pada ikatan perasaan sesuku yang ditandai dengan kesamaan budaya, bahasa atau kesetiaan pada suatu teritorialitas tertentu. Menguatnya etnosentrisme membawa sejumlah akibat. Pertama, menarik garis pemisah atau menjauhkan diri atau bahkan keluar dari tatanan negara bangsa. Kedua, berusaha mendudukkan orang sesuku dalam pemerintahan (kekuasaan politik). Ini sering kita temui dalam berbagai jenjang pemerintahan, baik pusat maupun daerah –lingkaran pertama di sekitar pejabat adalah orang sedaerah.

2.2. Teori Psikologi Politik

Psikologi politik bertujuan untuk memahami hubungan saling ketergantungan antara individu dan konteks yang dipengaruhi oleh keyakinan, motivasi, persepsi, kognisi, pemrosesan informasi, strategi pembelajaran, sosialisasi dan pembentukan sikap. Teori dan pendekatan psikologi politik telah diterapkan dalam banyak konteks seperti: peran kepemimpinan; pembuatan kebijakan dalam dan luar negeri; perilaku dalam kekerasan etnis, perang dan genosida; dinamika dan konflik kelompok; perilaku rasial; sikap dan motivasi memilih; pemungutan suara dan peran media; nasionalisme; dan ekstremisme politik¹²

Psikologi Politik dalam konteks psikologi kelompok yaitu perilaku politik dalam kelompok dan perilaku politik terkait keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok. Kelompok memiliki peran penting dalam dunia politik karna hampir Sebagian besar keputusan strategis menyangkut rakyat berada di tangan sekelompok kecil orang.¹³

Moreland (1987) menganggap kelompok atau integrasi sosial sebagai suatu kualitas yang dimiliki setiap kumpulan individu. Ketika tingkat integrasi sosial meningkat maka orang-orang mulai berpikir dan bertindak sebagai kelompok, bukan sebagai suatu kumpulan individu. Menurut perspektif fungsional,

¹² https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Psikologi_politik diakses pada 11 Juni 2023

¹³ Saloom, Gazi dan Ima Sri Rahmani. (2013). Pengantar Psikologi Politik. Banten. UIN Jakarta Press

kelompok dapat memenuhi berbagai kebutuhan seperti kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan psikologis kebutuhan informasi, dan kebutuhan interpersonal dan kebutuhan kolektif.¹⁴

Kelompok dapat juga memenuhi kebutuhan psikologis anggotanya seperti kebutuhan berafiliasi yaitu kebutuhan manusia yang berkaitan dengan penerimaan sosial atau pengakuan sosial dari orang lain, kebutuhan akan kekuasaan yaitu kebutuhan untuk mengendalikan orang lain.¹⁵ Dalam kajian psikologi sosial Teori FIRO (Fundamental Interpersonal Relation Orientation) dari Schutz (1958) dapat menjelaskan bagaimana bergabung dalam suatu kelompok dapat memenuhi kebutuhan psikologis manusia¹⁶.

Teori FIRO tersebut diuraikan kedalam 4 postulat, yaitu

2. Postulat 1, Postulat tentang kebutuhan antarpribadi, yakni (a) Setiap orang mempunyai tiga kebutuhan antarpribadi, yaitu inklusi, kontrol, dan afeksi; (b) Inklusi, kontrol, dan afeksi adalah tiga rangkaian perilaku antarpribadi yang cukup untuk meramalkan dan menerangkan gejala-gejala antarpribadi.
3. Postulat 2, Postulat kesinambungan hubungan. Perilaku seseorang dalam hubungan antarpribadi akan sama dengan perilaku yang telah dialami dengan hubungan terdahulu
4. Postulat 3, Postulat kompatibilitas. Jika kompatibilitas sebuah kelompok lebih besar dari kelompok lain, maka pencapaian tujuannya pun akan lebih besar.
5. Postulat 4, Postulat perkembangan kelompok. Pembentukan dan perkembangan hubungan antara dua orang atau lebih selalu mengikuti urutan yang sama¹⁶.

Dalam perspektif FIRO, bergabung dalam suatu kelompok dapat memenuhi tiga kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan inklusi, kebutuhan kontrol, dan kebutuhan afeksi. Inklusi adalah rasa ikut saling memilikidalam suatu situasi kelompok. Kebutuhan yang mendasari adalah hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Inklusi terdiri dari beberapa

¹⁴ Saloom, Gazi dan Ima Sri Rahmani. (2013). Pengantar Psikologi Politik. Banten. UIN Jakarta Press

¹⁵ Saloom, Gazi dan Ima Sri Rahmani. (2013). Pengantar Psikologi Politik. Banten. UIN Jakarta Press

¹⁶ Schutz, W. C. (1958). *FIRO: A three-dimensional theory of interpersonal behavior*. Rinehart.

macam, mulai dari interaksi intensif sampai penarikan atau pengucilan diri sepenuhnya. Kontrol adalah aspek pembuatan keputusan dalam hubungan antarpribadi. Kebutuhan yang mendasarinya adalah keinginan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam kaitannya dengan wewenang dan kekuasaan. Afeksi adalah mengembangkan keterikatan emosional dengan orang lain. Kebutuhan dasarnya adalah hasrat untuk disukai dan dicintai.¹⁷

Dalam postulat 3 dikatakan bahwa kelompok yang lebih kompatibel lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok daripada kelompok yang tidak kompatibel. Istilah kompatibilitas digunakan oleh Schutz untuk menunjukkan derajat hubungan antara dua orang atau lebih. Dua orang dikatakan kompatibel bila mereka bisa bekerja sama dengan serasi.¹⁸

Dalam hubungan ini Schutz membedakan tiga jenis kompatibilitas, yaitu

a. Kompatibilitas saling terkait (interchange compatibility).

Kompatibilitas jenis ini, antara dua orang, adalah maksimum jika derajat perilaku yang ditunjukkan maupun yang diharapkan oleh salah satu pihak persis sama dengan yang ditunjukkan atau diharapkan pihak lain. Perilaku dan harapan ini bisa menyangkut bidang kebutuhan inklusi, kontrol ataupun afeksi

b. Kompatibilitas asal-usul (originator compatibility)

1. Di bidang afeksi, kompatibilitas maksimum tercapai jika orang yang ingin mengekspresikan afeksi bertemu dengan orang yang ingin mendapat afeksi
2. Di bidang kontrol, kompatibilitas maksimum tercapai jika orang yang ingin mendominasi orang lain berjumpa dengan orang yang ingin diatur
3. Di bidang inklusi, kompatibilitas maksimum tercapai jika orang yang ingin melakukan kegiatan yang membutuhkan pengikut, berjumpa dengan orang yang ingin diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan itu.

¹⁶ Sarwono, Sarlito W. (2019). Teori-Teori Psikologi Sosial. Depok. Rajawali Pers

¹⁸ Sarwono, Sarlito W. (2019). Teori-Teori Psikologi Sosial. Depok. Rajawali Pers

c. Kompatibilitas timbal balik (reciprocal compatibility)

Kompatibilitas jenis ini diukur dengan derajat ekspresi yang ingin ditunjukkan oleh salah satu pihak dalam salah satu dari tiga bidang kebutuhan hubungan antar pribadi diatas dengan kadar harapan dari pihak lain.¹⁹

Salah satu jenis kelompok yang sangat erat hubungan antar pribadinya adalah kelompok etnis. Dimana orang-orang didalamnya terikat secara tradisi dan norma yang menjadi sebuah identitas bagi orang-orangnya. Psikologi kelompok akan menilai bagaimana etnis terbentuk dan dalam keadaan ekstrim menganggap dirinya lebih besar dan lebih baik dari etnis selain dirinya.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud sebagai kelompok adalah kelompok etnis patingjo yang mayoritas masyarakatnya menghuni Kabupaten Pinrang bagian Utara. Psikologi kelompok dinilai mampu menguraikan aspek-aspek interpersonal dari masyarakat etnis patingjo dan melihat bagaimana munculnya etnosentrisme yang kemudian mempengaruhi munculnya wacana pemekaran wilayah.

2.3. Konsep Ekonomi Politik

Ekonomi Politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara di selesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung (driven force) dalam memberikan solusi terhadap kasus – kasus ekonomi. (Hubungan antara Ekonomi dan Politik bisa bermakna eksplanatori (menjelaskan bagaimana keduanya terkait) dan bisa juga bersifat normatif (bagaimana seharusnya sifat perkaitan di antara kedua disiplin ilmu tersebut²⁰).

Menurut Yanuar Ikbar yang dimual di dalam buku Muslim Mufti menjelaskan bahwa politik ekonomi pada dasarnya merupakan unsur atau elemen yang menjadi alat ekonomi dan rasionalisasi kekuatan politik dalam melaksanakan rencana – rencana aplikasi ekonomi, untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Mufti, 2013;176). Bahwa pada dasarnya, ekonomi politik merupakan

¹⁹ Sarwono, Sarlito W. (2019). Teori-Teori Psikologi Sosial. Depok. Rajawali Pers

²⁰ Fahmi, I. (2013). Ekonomi Politik Teori dan Realita. Bandung: Alfabeta.

serangkaian tali hubungan yang bersifat saling memengaruhi (Mufti, 2013;177).

Beberapa pendekatan yang ada dalam Ekonomi Politik. Secara teoretis, ada dua pendekatan ekonomi politik yang saling berhadapan, yaitu pendekatan yang berpusat pada pasar (Market Oriented) dan pendekatan yang berpusat pada negara (State Oriented). Pendekatan yang berpusat di negara didasarkan asumsi bahwa negara memiliki agenda sendiri dalam hubungannya dengan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Asumsi pendekatan ini sangat bertentangan dengan pendekatan ekonomi politik liberal klasik ataupun turunannya neoliberal, bahwa peran pemerintah relatif dibatasi hanya sebagai penjaga stabilitas, yang memungkinkan pasar menjalankan fungsinya dengan sempurna (Mufti, 2013:193-194). James A Caporaso dan David P Levine menjelaskan beberapa teori yang ada dalam ekonomi politik di dalam bukunya. Beberapa diantaranya yaitu:

a. pendekatan klasik.

pendekatan klasik dalam buku caporaso dan levine terbagi menjadi dua bagian yang pertama adalah mengenai argumen tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri dan yang kedua adalah mengenai teori nilai dan distribusi. Bagian yang pertama membahas tentang sifat dari sistem pasar dan hubungan antara pasar dan negara. Bagian yang kedua membahas tentang produksi dan penggunaan surplus ekonomi. Bagian kedua ini lebih banyak mengambil dari kontribusi – kontribusi terbaru di masa modern yang menggunakan pendekatan klasik. Dalam pendekatan klasik para pemikir ekonomi politik dari era klasik mengajukan dan menguraikan dua ide utama yaitu bahwa ilmu ekonomi dapat dipandang sebagai berdiri sendiri dan bahwa bidang ekonomi politik adalah bidang yang lebih penting daripada yang lain (Caporaso dan Levine, 2015; 68-69)

b. Pendekatan Marxian dalam Ekonomi Politik.

Penganut Marxian ada yang memandang politik sebagai pemisah antara masyarakat sipil dari wilayah publik (di mana hak kesetaraan dianggap hanya ada dalam wilayah publik), politik sebagai peran negara dalam mengelola kepentingan. Pendekatan Marxian terhadap ekonomi politik, berusaha

untuk memahami hubungan antara negara dengan perekonomian. Teori Marxian lebih memfokuskan pada proses – proses reproduksi yang bersifat objektif dan tidak memfokuskan telaaahnya pada proses subjektif yaitu penentuan peringkat peluang atau pembuatan pilihan oleh individu. Konsep kelas merupakan konsep utama dari teori Marxian. Istilah ekonomi politik yang digunakan dalam teori marxian merujuk pada sebuah cara berpikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir – pemikir ekonomi klasik. Metode ini menekankan pada ide bahwa perekonomian pasar bekerja menurut prinsip – prinsip reproduksi dan ekspansi sistem kesalingtergantungan material antar orang dengan kata lain pemabagian kerja sosial. Tiga aliran dalam pendekatan Marxian yaitu politik revolusioner, politik kompromi kelas, teori negara marxis (Caporaso dan Levine, 2015; 123-178) c. Ekonomi Politik Neoklasik

Ide utama dari pemikiran neoklasik adalah “pilihan yang dibatasi” (constrained choice). Konsep ini memandang individu sebagai pelaku utama yang membuat pilihan atau orang yang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasinya sendiri tentang dampak dari tiap – tiap alternatif itu bagi dirinya sendiri (Caporaso dan Levine, 2015;184). Membangun sebuah ilmu ekonomi politik berdasarkan pendekatan neoklasik adalah sama dengan mempertimbangkan masalah kegagalan pasar (karena pendekatan neoklasik sebenarnya tidak membutuhkan politik dan lebih menekankan ekonomi, maka politik baru diperlukan ketika kalau ekonominya gagal, atau dengan kata lain kalau pasarnya sudah gagal). Ekonomi politik neoklasik menelaah situasi – situasi dimana pasar tidak berhasil memberikan peluang kepada individu – individu untuk mencapai level pemenuhan kebutuhan yang semaksimal mungkin sesuai dengan suber daya yang tersedia (Caporaso dan Levine, 2015;202)

c. Ekonomi Politik Keynesian

Ekonomi Politik Keynesian mengajukan kritik terhadap konsep pasar yang meregulasi dirinya sendiri yang banyak digunakan oleh para pemikir klasik dan neoklasik. Kritik dari pendekatan

keynesian mengatakan bahwa kegagalan untuk menemukan pembeli bisa jadi merupakan masalah sistematis yang tidak ada hubungannya dengan ketidakcocokan antara apa yang diproduksi dengan apa yang diperlukan, melainkan bisa disebabkan karena kegagalan dari mekanisme pasar itu sendiri untuk menarik pembeli – pembeli yang memiliki daya beli yang cukup. Dengan kata lain pasar gagal untuk mempertemukan permintaan dengan pasokan. (Caporaso dan Levine, 2015;237) Pemikir Keynesian mengajukan argumen bahwa stabilitas dan kecukupan dari fungsi pasar bisa didapatkan dengan menggunakan mekanisme – mekanisme otomatis, yaitu dengan menggunakan sarana administratif dan bukan politik. Pendekatan Keynesian memfokuskan pada ketidak stabilan proses reproduksi dengan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis. Keynes menyimpulkan bahwa kalau perekonomian kapitalis dibiarkan bekerja tanpa intervensi, maka akan terjadi dimana situasi dimana sumberdaya yang ada tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan untuk menjamin adanya stabilitas dari proses reproduksi dan adanya penyerapan tenaga kerja secara memadai (Caporaso dan Levine, 2015; 238-243).

d. Pendekatan Berbasis Negara dalam Ekonomi Politik

Dalam pendekatan ini terdapat Pendekatan Utilitarian. Eric Nordlinger berusaha untuk menerapkan pendekatan utilitarian pada negara – negara yang bertindak menurut agenda mereka sendiri. Istilah “Negara” menurut Nordlinger merujuk pada semua individu yang 17 memegang jabatan dimana jabatan ini memberikan kewenangan kepada individu – individu untuk membuat dan menjalankan keputusan – keputusan yang mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen – segmen dalam masyarakat. dalam pandangan Nordlinger Otonomi Negara adalah berbentuk kemampuan dari para pejabat negara untuk melaksanakan pilihan – pilihan mereka dengan cara menterjemahkan pilihan – pilihan itu kedalam kebijakan publik, yang bisa selaras atau bisa juga bertentangan dengan pilihan – pilihan dari orang lain yang bukan pejabat negara (Caporaso dan Levine, 2015;452) Itulah beberapa teori yang ada dalam ekonomi politik, dimana pada

intinya ada pasar yang menguasai negara dan sebaliknya negara yang menguasai pasar. Teori yang akan saya gunakan yaitu ekonomi politik neoklasik khususnya dalam model pendekatan terpusat ke negara ekonomi tidak beroperasi secara bebas dalam ruang hampa, tetapi ada keseimbangan antara pasar dan negara, dimana negara ikut menentukan bagaimana ekonomi beroperasi. Artinya dalam perspektif ekonomi politik neoklasik khususnya dalam model terpusat ke negara kita melihat negara berperan lebih aktif (Deliarnov, 2006:66). Menurut Caporaso dan Levine (1993) dalam buku deliarnov menyebutkan, pendekatan terpusat ke negara tidak mesti dimulai dengan kegagalan pasar dalam mengidentifikasi peran politik vis a vis peran ekonomi. Jika negara punya tujuan – tujuan sendiri, dan jika dalam upaya mengejar tujuan – tujuan tersebut membawa implikasi terhadap peristiwa –peristiwa ekonomi dan institusi – institusi ekonomi, maka negara bisa mengontrol ekonomi bukan untuk mengontrol kegagalan pasar, tetapi demi mencapai tujuan – tujuannya sendiri. Negara punya kemampuan untuk menentukan dan mengejar agenda yang tidak ditentukan oleh kepentingan privat.

2.4. Konsep Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa bagian wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang akan di bentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu di upayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa dating. Selanjutnya dalam satu usaha pemekaran wilayah akan di ciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat. Ada yang merasa diuntungkan atau sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru di sebabkan jarak pergerakan berubah.

Menurut Siswanto Sunarno (2009), pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pembentukan daerah pemerintahan dapat dilakukan dalam dua tipe atau bentuk, yakni berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran daerah menjadi dua daerah atau lebih.²¹

Selain dari aspek administrasi dan percepatan pembangunan. Banyak hal yang dapat mendasari terjadinya pemekaran wilayah dalam suatu daerah. Salah satu yang kerap terjadi adalah adanya dua etnis besar dalam suatu wilayah yang sama-sama menganggap bahwa kelompoknya sepatutnya mendapatkan porsi kekuasaan yang sama. Dalam kasus seperti itu, pemekaran wilayah menjadi solusi untuk menjegah perpecahan antar kelompok dalam satu daerah

Pemekaran wilayah di landasi oleh Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Pada pasal 5 ayat 2 di nyatakan bahwa: daerah undang No.22 tahun1999 di gantikan dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut di nyatakan : Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 4 Undang-undang tersebut di nyatakan: pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana di maksudkan pada ayat 3, Dapat di lakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Pemekaran wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau territorial reform atau administrative reform, yaitu *“management of the size, shape and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals”* (reformasi

²¹ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cet-III, (Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2009), p. 15.

teritorial atau reformasi administrasi, yaitu pengelolaan ukuran, bentuk, dan hierarki satuan pemerintah daerah untuk maksud mencapai atau melaksanakan tujuan politik dan administrasi). Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah.²²

Pemekaran wilayah adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Effendy (2008) mengatakan bahwa pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, Kehidupan demokrasi, Perekonomian daerah, Pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar antar daerah dan pusat. Pada hakekatnya pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya secara berkelanjutan, Meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor. Memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup (PP No.29 Tahun 2000).

Adapun syarat fisik yaitu paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan sebuah kabupaten baru. Kemudian 4 (empat) untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, saran dan prasarana.

Dalam konteks penelitian ini, pemekaran wilayah yang dimaksudkan yaitu pada Kabupaten Pinrang di bagian utara yang terbagi atas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Batulappa. Adapun jumlah desa pada ketiga kecamatan ini terdiri atas 36 desa dan kelurahan. Jika ditinjau dari jumlah kecamatan di Kabupaten Pinrang bagian utara ini tentunya tidak memenuhi syarat fisik. Namun, dengan jumlah desa

²² Ratnawati, T. (2010). Satu dasa warsa pemekaran daerah Era reformasi: Kegagalan otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Politik*, No. 21, 122-145.

dan kelurahan ini pada ketiga kecamatan dianggap layak untuk membentuk kecamatan baru guna memenuhi syarat fisik untuk melakukan proses pemekaran pada Kabupaten Pinrang bagian Utara.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha atau upaya peneliti untuk mencari sumber referensi yang akan menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu bermanfaat bagi peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Farkhati Himatul Izza dari Universitas Wahid Hasyim dengan judul penelitian “Politik Pemekaran Daerah: Proses Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan” pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menguraikan proses-proses pemekaran Kabupaten Brebes Selatan baik secara administratif maupun secara politis. Peneliti menemukan bahwa muncul berbagai polemik, pro dan kontra. Pada umumnya wacana pemekaran daerah adalah sebuah aspirasi yang sangat sedikit disuarakan oleh masyarakat, karena memang pada intinya yang di butuhkan masyarakat adalah kesejahteraan. Penulis menguraikan proses pemekaran sedangkan apa yang ingin saya jelaskan dalam penelitian ini adalah pengaruh etnosentrisme terhadap wacana pemekaran itu sendiri.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Irwan MB dari Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “Pemekaran Kabupaten Polewali-Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat : Suatu Analisis Persepsi Masyarakat di Kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi” pada tahun 2005. Dalam penelitian tersebut, penulis berusaha menganalisis persepsi masyarakat terhadap proses pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa. Peneliti menemukan bahwa Sebagian besar masyarakat telah memahami ide/isu dari pemekaran wilayah dan mereka juga mengetahui pihak-pihak yang terlibat namun pengetahuan

masyarakat menurut penulis masih kurang mengenai pemekaran wilayah sehingga mereka hanya menjadi alat kepentingan. Peneliti meninjau persepsi masyarakat tentang pemekaran wilayah sedangkan apa yang ingin saya jelaskan adalah etnosentrisme sebagai latar belakang munculnya wacana pemekaran wilayah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saeful Anwar dari Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “Pemekaran Wilayah Bone Selatan” pada tahun 2014. Dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan bagaimana proses pembentukan Kabupaten Bone Selatan mulai dari latar belakang munculnya tuntutan pemekaran sampai bagaimana implikasi dari kebijakan pemekaran tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh munculnya tuntutan pemekaran wilayah dikarenakan masyarakat di daerah Bone bagian selatan merasa adanya sikap diskriminasi oleh pemerintah daerah Bone. Dimana diskriminasi yang dimaksud seperti dari segi infrastruktur dan pelayanan. Pemekaran tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat Bone Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang baik. sedangkan yang ingin saya teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana etnosentrisme memengaruhi munculnya isu dan tuntutan pemekaran wilayah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Kamrin H. Jama dari Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “Pemekaran Wilayah Kabupaten dan Pergeseran Budaya Politik Lokal di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah” pada tahun 2006. Dalam penelitian tersebut, peneliti mendeskripsikan dampak dari pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap partisipasi politik dan pengaruh budaya politik lokal terhadap pembentukan kabupaten. Penulis mendapatkan hasil bahwa setelah terjadinya pemekaran wilayah ada pergeseran budaya politik yang awalnya karakter budaya politik lokal yang berorientasi vertikal yang menganggap pemerintah sebagai “pamarentah” sebagai adikuasa sehingga masyarakat tunduk dan patuh. Setelah pemekaran, budaya itu bergeser dari partisipasi politik pasif (tidak aktif) menjadi partisipasi politik aktif

sebagai wujud pergeseran budaya politik lokal di Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini menjelaskan mengenai dampak dari pemekaran wilayah yang menghasilkan sebuah pergeseran budaya politik sedangkan yang ingin saya teliti adalah latar belakang dari munculnya sebuah wacana pemekaran wilayah.

Dengan demikian, dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang dijadikan rujukan dan referensi pada penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan banyak terletak perbedaan dari judul dan isi, serta yang menjadi fokus utama penulis disini yaitu melihat etnosentrisme dalam wacana pemekaran. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh etnosentrisme terhadap wacana pemekaran.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir peneliti dalam memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian. Adapun dalam penelitian kualitatif perlu landasan yang mendasari penelitian agar lebih terarah. Sehingga mampu mengembangkan konteks dan konsep penelitian dalam hal metodeologi, serta penggunaan teori. Penjelasan yang disusun menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat.

Tujuan dari kerangka berpikir adalah terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal. Selain itu, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, juga membutuhkan hasil pencarian sumber- sumber. Hingga pada akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Masyarakat di Kabupaten Pinrang dihuni sebagian besar oleh dua suku yaitu suku bugis dan suku pattinjo. Masyarakat yang menaungi daerah bagian utara Kabupaten Pinrang mayoritas adalah masyarakat suku pattinjo. Beberapa tahun belakangan muncul sebuah wacana yaitu wacana untuk memekarkan Pinrang bagian utara menjadi sebuah daerah

otonomi baru. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai aspek dimana salah satunya merupakan isu etnosentrisme. Namun, selain daripada persoalan kesukuan, banyak persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat utara seperti kurang meratanya pembangunan, minimnya akses, dan kurang dilirikannya orang-orang Pattinjo dalam panggung politik Kabupaten Pinrang. Hal ini lah yang kemudian mendorong masyarakat Kabupaten Pinrang bagian Utara menggaungkan wacana pemekaran wilayah kabupaten pinrang utara. Maka dari itu, penulis ingin menguraikan bagaimana pengaruh etnosentrisme dan ekonomi politik dalam wacana pemekaran di Kabupaten Pinrang bagian Utara

2.7. Skema Pemikir

Berikut adalah skema pemikiran pada penelitian ini :

